

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Disusun Oleh:

Thereca Febryani Goba Puspita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang

Dosen Pembimbing:

Kusuma Ratnawati

Abstract: *The implementation of regional autonomy through fiscal decentralization scheme has not been able to exploit regional income that, in the long run, can support the success of the region in implementing the regional autonomy. With regard to such a problem, this research aims at examining the financial performance of the regional government in Sikka regency through ratio analysis towards the regional finance (financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, compatibility ratio, and growth ratio). This descriptive quantitative research applies document study for the data collection method. The data of this study were obtained through documentation method. The results of the analysis illustrate that the financial independence of Sikka Regency is still low, and it is categorized into instructive relationship pattern. Meanwhile, its own-source revenue is very effective, and its regional tax is efficient. However, the regional expenditure shows lack of compatibility in terms of its direct and indirect expenditures towards the total expenditure of the region. In addition, the regional income and expenditure growths also persistently fluctuate.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Regional Government Financial Ratio*

Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah melalui skema desentralisasi fiskal Kabupaten Sikka tidak sepenuhnya mampu menggali sumber pendapatan daerah yang kedepannya akan menunjang keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah (rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Hasil analisis data menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sikka masih rendah dan masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Sementara efektivitas PAD masuk dalam kategori sangat efektif, dan efisiensi pajak daerah masuk dalam kategori efisien. Namun, keserasian belanja daerah menunjukkan belum adanya keserasian antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah, serta pertumbuhan pendapatan daerah dan pertumbuhan belanja daerah masih berfluktuasi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Keuangan Daerah.

1. Pendahuluan

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia mencerminkan adanya respon masyarakat yang sangat tinggi akan permintaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), hal ini terbukti dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan yang mendasar dalam tata penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satu aspek yang esensial adalah perubahan dan penataan terhadap keuangan daerah, untuk terselenggaranya daerah otonom, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota (Domai, T., 2013:135).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan kemampuan, akan tetapi menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Halim (2004:148) menyatakan, salah satu alat analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Penggunaan analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga dapat

digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah sebab kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Melalui analisis rasio terhadap APBD juga akan sangat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan.

Sebagian besar daerah otonom di Indonesia dapat dikatakan belum mampu dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan APBD suatu daerah masih didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lain-lain, yang disebabkan oleh daerah kurang mampu dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, selain itu juga dikarenakan adanya inefisiensi dalam belanja daerah.

Kabupaten Sikka adalah salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah dengan memiliki banyak potensi sektor perekonomian. Sebagaimana dikutip dari data *sikkakab.bps.go.id*

sektor perekonomian Kabupaten Sikka masih bertumpu pada perekonomian pertanian, kehutanan dan perikanan. Potensi sektor perekonomian dapat digali dan dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah, namun pada kenyataannya, potensi daerah Kabupaten Sikka belum diberdayakan secara optimal padahal sebenarnya potensi-potensi tersebut sangat prospektif dan menjanjikan. Walaupun potensi daerah Kabupaten Sikka belum dimanfaatkan secara optimal, pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka mencapai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi unggulan yang sama dengan potensi unggulan di Kabupaten Sikka yaitu Kabupaten Lombok Timur,

pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka jauh lebih rendah dari pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Timur. Dengan memiliki beberapa potensi unggulan ini, seharusnya Kabupaten Sikka mencapai kinerja keuangan yang bagus.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan maka perlu untuk meneliti mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah Kabupaten Sikka. Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka ditinjau berdasarkan rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pajak daerah, rasio keserasian belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah, dan rasio pertumbuhan (*growth ratio*).

2. Landasan Teori

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:32) “manajemen keuangan daerah sebagai usaha-usaha yang dilakukan manajer, yakni pemerintah daerah, dalam membelanjakan dana yang dimiliki daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran tersebut”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kemampuan pengelolaan keuangan suatu daerah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut. Menurut Bastian (2006:189) “APBD merupakan penjabaran rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Kinerja Keuangan Daerah

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi,

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) organisasi. Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan di daerah, A., Oesi (2013:3) dalam jurnalnya menyebutkan kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Menurut Faud, R. M (2016:138) mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan meliputi:

(1.) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004:150) rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang diperlukan daerah. Faud, R. M (2016:138) mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: *Faud, R. M, 2016:138*

(2.) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2002:234) rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan:

Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Faud, R. M (2016:140) semakin tinggi nilai rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah dalam memungut sumber-sumber pendapatan asli

daerah yang semakin tinggi. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: *Faud, R. M, 2016:140*

(3.) Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Halim (2007:130) menyatakan efisiensi pajak daerah menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pajak daerah, sehingga dapat diketahui efisien atau tidaknya kegiatan pemungutan pajak daerah tersebut. Mahmudi (2016:142) menyatakan bahwa semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Rasio efisiensi pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: *Mahmudi, 2016:142*

(4.) Rasio Keceragaman Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

a. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

Halim (2007:131) menyatakan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal. Rasio belanja langsung terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Belanja Langsung Terhadap Total} \\ & \text{Belanja} \\ & = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi, 2016:164

b. Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

Halim (2007:131) menyatakan rasio belanja langsung terhadap total belanja menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah secara optimal. Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap} \\ & \text{Total Belanja} \\ & = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi, 2016:164

(5.) Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Mahmudi (2016:137)

mengatakan:

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Rasio pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \\ & \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } t-1}{\text{Pendapatan Thn } t-1} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber: Mahmudi, 2016:137

b. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Mahmudi (2016:137)

mengatakan analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Rasio

pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan belanja tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Sumber: *Mahmudi, 2016:158*

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka. Penelitian ini berlangsung pada 25 April sampai dengan 05 Mei tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan, informasi tambahan, dan

4. Hasil Analisis Data

(1.) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat + Provinsi dan Pinjaman			RKKD	Pola Hubungan
		Pendapatan Transfer	Pinjaman Daerah	Total		
2011	33.673.190.436	479.754.043.366	-	479.754.043.366	7,01%	Instruktif
2012	44.856.240.310	516.303.287.443	-	516.303.287.443	8,68%	Instruktif
2013	50.257.084.172	572.269.587.645	-	572.269.587.645	8,78%	Instruktif
2014	78.356.674.459	651.556.169.483	-	651.556.169.483	12,02%	Instruktif
2015	78.096.258.303	804.522.350.308	-	804.522.350.308	9,70%	Instruktif
Rata-Rata					9,23%	Instruktif

Sumber: *Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015*

berbagai data yang diperoleh terkait dengan masalah yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi adalah studi dokumentasi. Langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan diklasifikasikan berdasarkan rasio kinerja keuangan daerah selanjutnya dilakukan perhitungan berdasarkan rasio tersebut. Hasil perhitungan yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan serta dikembangkan sesuai dengan klasifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka tahun 2011-2015.

(2.) Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Kategori
2011	33.673.190.436	30.708.603.692	109,65%	Sangat Efektif
2012	44.856.240.310	46.345.937.868	96,78%	Cukup Efektif
2013	50.257.084.172	47.340.132.736	106,16%	Sangat Efektif
2014	78.356.674.459	41.977.419.457	186,66%	Sangat Efektif
2015	78.096.258.303	78.754.102.822	99,16%	Cukup Efektif
Rata-rata			119,68%	Sangat Efektif

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015*

(3.) Analisis Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tabel 4.3
Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efisiensi	Kategori
2011	381.732.730	3.929.886.022	9,71%	Sangat Efisien
2012	1.776.638.233	5.737.158.005	31,00%	Kurang Efisien
2013	735.672.764	8.526.091.731	8,62%	Sangat Efisien
2014	1.484.907.790	9.511.660.055	15,61%	Efisien
2015	501.882.287	11.608.213.126	4,32%	Sangat Efisien
Rata-rata			13,85%	Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

(4.) Analisis Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

Tabel 4.4
Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah
2011	159.402.048.869,00	527.528.347.059,00	30,21%
2012	204.948.156.013,00	609.684.083.808,00	33,61%
2013	216.796.249.957,00	659.436.882.241,00	32,87%
2014	280.172.283.041,00	737.010.073.481,00	38,01%
2015	360.618.396.486,00	895.239.798.028,00	40,28%
Rata-Rata			34,99%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

(5.) Analisis Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

Tabel 4.5
Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah
2011	366.294.705.290,00	527.528.347.059,00	69,43%
2012	404.735.927.795,00	609.684.083.808,00	66,38%
2013	442.640.632.284,00	659.436.882.241,00	67,12%
2014	456.837.790.440,00	737.010.073.481,00	61,98%
2015	534.621.401.542,00	895.239.798.028,00	59,71%
Rata-Rata			64,92%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

(6.) Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 4.6
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
2010	456.011.645.557	-
2011	560.112.789.882	22,82%
2012	596.642.660.753	6,52%
2013	674.270.379.817	13,01%
2014	814.218.389.942	20,75%
2015	882.618.608.611	8,40%
Rata-rata		14,30%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

**(7.) Analisis Rasio Pertumbuhan
Belanja Daerah**

Tabel 4.7

Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah
2010	456.192.683.623	-
2011	527.528.347.059	15,63%
2012	609.684.083.808	15,57%
2013	658.905.582.391	8,07%
2014	737.010.073.481	11,85%
2015	895.239.798.028	21,46%
Rata-rata		14,51%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Sikka Tahun 2011-2015

5. Pembahasan Hasil Penelitian

**(1.) Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sikka dapat diketahui bahwa selama tahun 2011-2015, nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sikka cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2015 nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sikka mengalami penurunan, walaupun demikian dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sikka semakin baik terlihat dari adanya kesungguhan dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sikka.

Selama tahun 2011-2015, rata-rata sumbangsih dana transfer terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sikka sebesar 86,53%. Dana transfer yang berkontribusi paling tinggi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sikka selama tahun pengamatan adalah dana alokasi umum, dengan rata-rata kontribusi sebesar 69,11%, sedangkan rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sikka sebesar 7,88%.

(2.) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sikka tahun 2011-2015 diketahui bahwa dilihat dari besarnya komponen pendapatan asli daerah yang berkontribusi tinggi terhadap perolehan pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah dengan rata-rata 43,65%, kemudian diikuti oleh lain-lain PAD yang sah sebesar 37,95%, pajak daerah sebesar

13,68%, dan yang paling rendah daerah yang dipisahkan sebesar 4,35%.

Pada pos pajak daerah, sumbangsih tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 5,4%, kecuali pada tahun 2013 sumbangsih tertinggi untuk pajak daerah diperoleh dari pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 6,28%. Sumbangsih terendah pajak daerah adalah pajak parkir dengan rata-rata sumbangsih sebesar 2,26%. Selanjutnya pada pos retribusi daerah, sumbangsih tertinggi retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan dengan

(3.) Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Sikka, diketahui bahwa selama tahun 2011-2015 pemerintah daerah Kabupaten Sikka sudah efisien dalam memungut pajak daerah, walaupun realisasi biaya pemungutan pajak daerah selama tahun pengamatan dapat dikatakan belum stabil, akan tetapi pajak daerah yang diperoleh selama tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan.

adalah hasil pengelolaan kekayaan rata-rata sebesar 23,87%. Berikutnya dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTT, dengan sumbangsih terhadap perolehan pendapatan asli daerah sebesar 4,36%. Terakhir dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sumbangsih tertinggi adalah pendapatan BLUD yang diperoleh dari pendapatan jasa layanan umum BLUD sebesar 18,35%.

Berdasarkan informasi tambahan yang diperoleh, pada tahun 2011-2012 biaya yang dikeluarkan ini adalah biaya pemungutan, sedangkan pada tahun 2013-2015 biaya pemungutan diganti dengan pemberian insentif kepada petugas yang melakukan pemungutan pajak daerah, karena untuk biaya pemungutan seperti biaya untuk administrasi dan lain sebagainya disatukan dalam anggaran ATK dinas yang berkaitan.

(4.) Rasio Kesorasian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio kesorasian belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Kabupaten Sikka, diketahui bahwa proporsi belanja langsung sangat besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, seperti realisasi untuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Selain belanja barang dan jasa, proporsi yang besar juga adalah untuk belanja modal yang realisasi terbesarnya untuk belanja modal gedung dan bangunan yaitu pengadaan bangunan gedung kantor, dan juga belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu pengadaan jalan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, proporsi belanja tidak langsung sangat besar dialokasikan untuk belanja pegawai, seperti untuk realisasi gaji dan tunjangan yang besar untuk gaji pokok PNS/uang representasi dan tunjangan keluarga. Selain gaji dan

tunjangan, proporsi yang besar juga adalah untuk tambahan penghasilan PNS yang realisasi terbesarnya untuk tunjangan profesi guru PNSD (sertifikasi).

(5.) Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sikka menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan yang berfluktuatif, namun rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sikka dalam angka yang positif. Jika dilihat pertumbuhan tiap komponen pendapatan daerah, pertumbuhan tertinggi berasal dari pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar 39,48%

Berikutnya adalah pos pendapatan asli daerah sebesar 27,39%. Apabila dilihat dari besaran realisasi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah, pos dana perimbangan mencapai angka yang tertinggi, namun jika dilihat tingkat pertumbuhannya rata-rata pertumbuhan dana perimbangan mencapai 12,45%.

(6.) Analisis Rasio Pertumbuhan belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sikka diketahui bahwa pada tahun 2011 rasio pertumbuhan belanja 7,19% lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan, tetapi tahun 2012 pertumbuhan belanja 9,05% lebih besar dari pertumbuhan pendapatan sehingga pada tahun ini Kabupaten Sikka mengalami defisit anggaran, selanjutnya tahun 2013 rasio pertumbuhan belanja 4,94% lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan, tahun 2014 pertumbuhan belanja 8,9% lebih kecil dari pertumbuhan pendapatan, namun pada tahun 2015 pertumbuhan belanja kembali meningkat sehingga rasio pertumbuhan belanja 13,06% lebih besar dari pertumbuhan pendapatan, maka pada tahun 2015 Kabupaten Sikka kembali mengalami defisit anggaran.

Surplus APBD Kabupaten Sikka pada tahun 2011, 2013, 2014 digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pada Bank NTT Cabang Maumere. Selain untuk penyertaan modal (investasi), surplus APBD

Kabupaten Sikka pada tahun 2013 digunakan untuk pembayaran pokok utang, dan surplus APBD Kabupaten Sikka pada tahun 2014 selain digunakan untuk penyertaan modal (investasi) juga digunakan untuk pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Begitu pula sebaliknya, untuk menutupi defisit anggaran pada tahun 2012 dan tahun 2015, pemerintah daerah Kabupaten Sikka menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan juga penerimaan kembali pemberian pinjaman.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2011-2015 masih rendah sekali dan masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam memungut pendapatan asli daerah tahun 2011-2015 dikatakan sudah sangat efektif, tetapi efisiensi pajak daerah

Kabupaten Sikka masih berada dalam kategori efisien.

Keserasian belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2011-2015 menunjukkan belum adanya keserasian antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah, dimana proporsi belanja langsung lebih kecil dibanding proporsi belanja tidak langsung.

Pertumbuhan pendapatan daerah dan pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2011-2015 masih berfluktuasi atau belum stabil. Hasil pertumbuhan positif disebabkan oleh penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja yang selalu meningkat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sikka sebaiknya mulai meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali potensi-potensi baru yang dimiliki

dan mengoptimalkan beberapa potensi daerah Kabupaten Sikka yang memiliki prospek besar, dan meningkatkan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Sikka. Pemerintah daerah Kabupaten Sikka juga sebaiknya merencanakan model kerja sama antara pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat Kabupaten Sikka dalam rangka pengembangan potensi daerah Kabupaten Sikka.

Selain itu, perlu mempertahankan efektivitas pendapatan asli daerah dengan memperhatikan estimasi target anggaran sehingga mempermudah dalam pencapaian target. Pemerintah daerah Kabupaten Sikka harus lebih cermat dalam menghitung biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pajak daerah dengan memperhatikan kuantitas aparatur pengelola sehingga tingkat efisiensi pajak daerah dapat lebih efisien.

Anggaran belanja tidak langsung sebaiknya dapat ditekan dengan cara melakukan penetapan kegiatan berdasarkan skala prioritas, selain itu juga melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak

untuk direalisasikan sehingga antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat seimbang, agar pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat sebaiknya mempertimbangkan kembali kebijakan pembagian hasil pajak sumber daya alam. Selain itu, pemerintah pusat juga sebaiknya memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Sikka

Masyarakat Kabupaten Sikka diharapkan berperan aktif serta mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah. Masyarakat Kabupaten Sikka sebagai pelaku ekonomi, khususnya wajib pajak diharapkan sadar akan kewajiban terhadap perekonomian daerah sehingga tidak melakukan

tindakan yang dapat merugikan daerah seperti melalaikan atau upaya menghindari kewajiban perpajakan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian tentang besarnya potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustina, Oesi., A. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Anonim. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diakses 13 Januari 2017, <https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/permendagri_13_2006.pdf>.
- Anonim. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Diakses 13 Januari 2017, <<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-105-tahun-2000-tentang-pengelolaan-dan-pertanggungjawaban->

- keuangan-daerah/--259-294-PP105_2000.pdf>.
- Anonim. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diakses 13 Januari 2017, <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005.pdf>.
- Anonim. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Diakses 13 Januari 2017, <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/UU-227-262-UU_No._32_Tahun_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf>.
- Anonim. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Diakses 13 Januari 2017, <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/UU-228-263-UNDANG_UNDANG_REPUBLIK_INDONESIA_NOMOR_33_TAHUN_2004.pdf>.
- Anonim. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses 12 Februari 2017, <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf>.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Basuki. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (1 ed.). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bisma, I. G., & Susanto, H. (2010, Desember). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal, IV*(3), 75-86.
- Damanhuri, Z. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Domai, T. (2013). *Manajemen Keuangan Publik* (2 ed.). Malang: UB Press.
- Djumhana, M. (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakt.
- Ekowati, N. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Faud, R. M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*

- Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fitriani, N. P., & Dwirandra, A. N. (2014). Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi*, VIII(1), 211-227.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, Sekretariat., Kabinet. (2015, Desember 8). *122 Daerah Ini Ditetapkan Pemerintah Sebagai Daerah Tertinggal 2015-2019*. Diakses 20 Juni 2017, <<http://setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019/>>.
- Komariah, A., & Satori, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, P., & Purwanto, A. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mohamad, I., Rasul, S., & Umar, H. (2004). *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Munandar, A. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Menggunakan Rasio Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bima Periode 2005-2011). *Tesis*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rosary, E. D. (2017, 2017 30). *Target PAD Kabupaten Sikka, tak Pernah Tercapai*. Diakses 25 Mei 2017, <<http://www.cendananews.com/2017/03/target-pad-kabupaten-sikka-tak-tercapai.html>>
- Riduwan. (2015). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- BPKAD Kabupaten Sikka. (2011). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*. Maumere: BPKAD Kabupaten Sikka.
- BPKAD Kabupaten Sikka. (2012). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012*.

- Maumere: BPKAD Kabupaten Sikka.
- BPKAD Kabupaten Sikka. (2013). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*. Maumere: BPKAD Kabupaten Sikka.
- BPKAD Kabupaten Sikka. (2014). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*. Maumere: BPKAD Kabupaten Sikka.
- BPKAD Kabupaten Sikka. (2015). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*. Maumere: BPKAD Kabupaten Sikka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka. (2015). *PDRB Kabupaten Sikka*. Diakses 31 Mei 2017, Kabupaten Sikka Dalam Angka 2015, <<https://sikkakab.bps.go.id/>>
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sikka. (2013). *Sejarah Kabupaten Sikka*. Diakses 10 Mei 2017, <<https://www.sikkakab.go.id/media.php?module=profil-daerah-d&id=8>>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yovina, M. (2016, Oktober 3). *Perkembangan Penduduk Masyarakat Kab. Sikka-Flores-NTT*. Diakses 10 Mei 2017, <https://mariayovina.wordpress.com/2016/10/03/perkembangan-penduduk-masyarakat-kab-sikka-flores-ntt/>
- Yuwono, S., Indrajaya, T. A., & Hariyandi. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia.
- Yuwono, S. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD. (2011-2015). *Data Keuangan Daerah Setelah TA 2006*. Diakses 6 Mei 2017, <http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316>.